

BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI MODEL MULTIKULTURALISME KHAS INDONESIA

Agustinus Wisnu Dewantara
STKIP Widya Yuwana Madiun
Email penulis pertama: dewacm@yahoo.co.id

Abstrak

Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain, sehingga bangsa ini secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multikultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap antitoleran terhadap "yang lain." Sejarah mencatat bahwa cara pandang ketunggalan dalam keberagaman khas Indonesia ternyata diselewengkan di zaman Orde Baru. Masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika kerap dilihat sebagai suatu fungsionalisme belaka. Ruang untuk mengelaborasi bagian-bagian sebagai keindahan kurang diberi tempat. Sentralisme gaya Orde Baru mematenkan keindahan tiap bagian yang amat berbhinneka ini. Slogan "Bhinneka Tunggal Ika" ini diperalat oleh kaum-kaum tertentu (yang mempunyai kepentingan) untuk melanggengkan kepentingannya, sehingga kebebasan diberangus habis. Tulisan ini secara khusus hendak menyoroti konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsep multikulturalisme khas Indonesia. Tulisan ini hendak meneropong tema multikulturalisme dengan memakai pendekatan hermeneutik. Model penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah model kualitatif dengan sebanyak mungkin menggunakan hermeneutika untuk membandingkan beberapa konsep dan paham mengenai multikulturalisme. Tujuan yang diharapkan dari pendalaman tema ini adalah untuk menemukan pemaknaan yang lebih komprehensif mengenai Bhinneka Tunggal Ika sebagai model penghayatan multikulturalisme di Indonesia.

Kata kunci: Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, multikulturalisme

Bangsa Indonesia semenjak pertama kali berdiri sudah dihadapkan dan disadarkan dengan fakta perbedaan yang multikultural, sehingga itu pula yang membuat para founding father melepaskan jubah-jubah perbedaan mereka, serta merumuskan Pancasila sebagai pondasi membangun negara ini. Bhinneka Tunggal Ika kemudian dipilih sebagai semboyan negara untuk menggambarkan betapa hebatnya hasrat bersatu dari segenap elemen bangsa yang saat majemuk ini. Kemajemukan bangsa adalah indikasi kuat bahwa sebenarnya bangsa ini sangat multikultural. Lalu bagaimana realitas multikulturalisme yang disimbolkan dengan Bhinneka Tunggal Ika dihadapi dewasa ini?

Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multikultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap antitoleran terhadap "yang lain." Aneka kasus bisa disebut di sini, misalnya: amuk massa, pembakaran tempat ibadah, aneka kerusuhan, konflik bernuansa SARA, tindak kekerasan terhadap aliran agama tertentu, dan aneka peristiwa tragis lainnya. Munculnya peraturan daerah (Perda) yang mengacu pada hukum agama tertentu di beberapa daerah segera menimbulkan persoalan bagi negara-bangsa multikultur dan demokratis seperti Indonesia. Tidak hanya karena Perda itu telah melanggar hirarki konstitusi, melainkan juga karena Perda itu sangat superfisial dan tidak substansial.

Sesungguhnya aneka kasus itu tak perlu terjadi jika pemerintah daerah memiliki komitmen pada aturan main, bahwa negara-bangsa ini adalah negara yang bersatu dalam keragaman, serta mengakui

bahwa kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang multikultural. Negara harus berangkat dari kepentingan seluruh elemen warga-negara yang multikultural. Jika kekuatan sektarian dan promordial itu dibiarkan berlarut-larut, maka bukan hanya saja mengancam, namun juga dapat membinasakan karakter negara-bangsa Indonesia yang multikultural, secara lebih jauh mungkin Indonesia akan mengalami suatu kolaps sosial-kebangsaan. Dari sini dapat dikatakan bahwa berbagai kekisruhan yang merebak di banyak tempat merupakan akibat dari rendahnya kesadaran dan wawasan multikulturalisme.

Tulisan ini secara khusus hendak menyoroti konsep *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai konsep multikulturalisme khas Indonesia. Tulisan ini hendak menepohong tema multikulturalisme dengan memakai pendekatan hermeneutik. Model penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah model kualitatif dengan sebanyak mungkin menggunakan hermeneutika untuk membandingkan beberapa konsep dan paham mengenai multikulturalisme. Tujuan yang diharapkan dari pendalaman tema ini adalah untuk menemukan pemaknaan yang lebih komprehensif mengenai *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai model penghayatan multikulturalisme di Indonesia.

Konsep Multikulturalisme dan *Bhinneka Tunggal Ika*

Multikulturalisme

Bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar. Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain, sehingga bangsa ini secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Raymundus Sudhiarsa mengutip pernyataan Will Kymlica yang mendefinisikan multikulturalisme sebagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda dan masing-masing mempunyai integritas dan tantangannya sendiri-sendiri (Sudhiarsa, 2008:74)

Konsep multikulturalisme tidak dapat begitu saja disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan menyentuh berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik, demokrasi, keadilan, penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti, penghormatan atas golongan minoritas, prinsip-prinsip etika-moral, dan mutu produktivitas. Usaha untuk membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila konsep multikultural menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia. Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai konsep multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya amat diperlukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

Pemahaman serta kesadaran tentang multikulturalisme sebenarnya sudah muncul sejak pendiri bangsa mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Tetapi dewasa ini pemahaman akan multikulturalisme mulai keluar dari konsep dasar tersebut. Artinya, bagi bangsa Indonesia masa kini, konsep

multikulturalisme menjadi sebuah terminologi yang baru dan asing (Suparlan,2002). Mengapa demikian? Karena kesadaran tentang konsep multikulturalisme yang dibentuk oleh pendiri bangsa ini telah terdistorsi pada masa Orde Baru. Kesadaran akan multikulturalisme dipendam atas nama persatuan dan stabilitas negara. Muncullah kemudian paham “mono-kulturalisme” yang bercirikan penyeragaman atas berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya.

Isu multikulturalisme dalam dunia politik global dewasa ini kembali mencuat dan menjadi fenomena yang menarik untuk diperhatikan. Multikulturalisme dewasa ini tidak hanya dimaksudkan untuk melawan imperialisme ataupun kolonialisme, melainkan juga untuk memperjelas identitas yang dimiliki oleh kelompok bangsa tertentu. Disintegrasi yang terjadi di beberapa negara merupakan konsekuensi logis dari kemunculan isu multikulturalisme dewasa ini. Multikulturalisme bernegara seharusnya mampu meruntuhkan sikap sempit yang menganggap golongannya sebagai yang paling baik, dan meruntuhkan dominasi etnis, suku, agama dan identitas lainnya demi membangun keutuhan negara.

Gejala konflik sosial (bernuansa agama, etnis, dan ras) tidak hanya melukai keutuhan bangsa, tetapi juga ikut mencabik natura (kodrat) suatu bangsa. Ketegangan etnis, agama, dan ras kerap menimbulkan kecenderungan untuk melepaskan diri dari pangkuan negara. Keragaman etnisitas acap kali dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik terselubung.

Keberagaman yang dipunyai oleh bangsa Indonesia adalah suatu keniscayaan, dan semuanya mempunyai tugas yang sama untuk memperjuangkannya. Setiap manusia Indonesia mau tidak mau harus mengakui keberadaan yang lain, sebagaimana sejarah membuktikan bahwa Nusantara pernah bersatu meskipun terpisah oleh lautan, bahasa, dan keyakinan. Konsep multikulturalisme Indonesia yang menggaribawahi pengakuan akan yang lain ini dibahasakan oleh Latief dalam kutipan berikut:

“Persatuan dan kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika*. Di satu sisi, ada wawasan kosmopolitanisme yang berusaha mencari titik temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasikan dalam Pancasila, UUD, dan segala turunan perundang-undangnya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralism yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti agama/keyakinan, budaya, bahasa daerah, dan unit-unit tertentu sebagai warisan tradisi budaya.” (Latief, 2011:44)

Multikulturalisme Indonesia dengan demikian memiliki karakter yang khas. Multikulturalisme Indonesia bukan pengagungan semangat bernegara yang memberangus keragaman, melainkan menghargainya dan menjadikannya sebagai dasar. Unsur-unsur primordial yang ada dalam masyarakat diangkat dan dijadikan pijakan bagi pembangkitan semangat bernegara.

Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Indonesia

Bangsa Indonesia mempercayai bahwa persatuan adalah hal yang penting, sehingga Bhinneka Tunggal Ika dipilih sebagai semboyan bangsa Indonesia. Visi ini menunjukkan bahwa bangsa ini sangat menerima perbedaan, baik itu suku, agama, ras, dan bahkan pemikiran sekalipun. Bangsa Indonesia tetap satu di tengah segala macam perbedaan. Multikulturalisme Indonesia ternyata dibangun di atas pondasi Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini sebelumnya juga pernah didengungkan oleh para pemuda pada 28 Oktober 1828 dengan mengusung semboyan: “satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa” sebagai perekat dan pemersatu perjuangan bersama. Identitas primordial dilebur menjadi satu identitas yang bernama Indonesia.

Soekarno, sebagai pencetus Pancasila, bukan hanya menjadi perumus multikulturalisme Indonesia yang khas, melainkan juga menjadi juru bicara multikulturalisme paling artikulatif, baik bagi Indonesia mau pun bagi negara-negara yang baru bebas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Barat. Multikulturalisme bagi Soekarno menjadi konsep sentral untuk membangun Indonesia yang mandiri dan terhormat di tengah percaturan internasional. Soekarno mengutuk eksklusivisme dan chauvinisme multikulturalisme Eropa, yang justru menciptakan eksploitasi terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Multikulturalisme, bagi Soekarno, harus berdasarkan rasa hormat kepada seluruh manusia.

Konsep multikulturalisme gotong-royong yang dikembangkan Soekarno mampu memikat dan mengikat seluruh bagian masyarakat Indonesia. Kecenderungan eklektiknya memungkinkan Soekarno merumuskan konsep multikulturalisme yang berdasarkan sejumlah sumber yang bisa bertolak belakang satu sama lain. Perumusan multikulturalisme Soekarno sempat mengambil analisis Marxis tentang penindasan imperialisme, sikap Sun Yat Sen ketika mendirikan Tiongkok, dan bahkan Hitler. Soekarno sebenarnya pada saat itu sedang mengembangkan gagasan sentral tentang nasion sebagai sebuah entitas yang dapat mendamaikan berbagai elemen yang bertentangan dalam masyarakat Indonesia dan mensubordinasikannya di bawah tujuan-tujuan jangka panjang Indonesia yang agung. Soekarno bahkan pada tahun 1960-an secara ekstrim memperkenalkan konsep Nasakom untuk menyimbolkan kesatuan multikulturalisme, agama, dan bahkan merangkul komunisme.

Sejarah mencatat bahwa cara pandang ketunggalan dalam keberagaman khas Indonesia ternyata diselewengkan di zaman Orde Baru. Masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika kerap dilihat sebagai suatu fungsionalisme belaka. Ruang untuk mengelaborasi bagian-bagian sebagai keindahan kurang diberi tempat. Sentralisme gaya Orde Baru mematikan keindahan tiap bagian yang amat berbhinneka ini. Slogan ”Bhinneka Tunggal Ika” ini diperalat oleh kaum-kaum tertentu (yang mempunyai kepentingan) untuk melanggengkan kepentingannya, sehingga kebebasan diberangus habis.

Banyak negara telah merasakan pahitnya perpecahan. Rezim demokrasi konstitusional seperti di Srilanka, Lebanon, Nigeria, dan Sudan, telah dihancurkan oleh konflik etnik yang mengakibatkan perang saudara (Diamond-Platter, 1998:11). Konflik tersebut pada saat yang sama memunculkan multikulturalisme etnis dan bahkan tribalisme yang bernyala-nyala, sebagaimana bisa dilihat pada kasus negara-negara bekas Yugoslavia. Indonesia sebenarnya berada pada kecemasan yang sama ketika didera oleh krisis ekonomi dan politik pada 1998. Banyak pengamat asing bahkan meramalkan Indonesia segera mengalami proses Balkanisasi atau disintegrasi. Prediksi tersebut tidak terbukti, dan sebaliknya, Indonesia tetap bertahan hingga kini.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya selalu mengingatkan bangsa ini akan kemungkinan adanya perpecahan, setidaknya ini yang ditekankan oleh Umar Kayam:

“Akan tetapi, segera pula kita melihat bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang selalu mengingatkan kita bahwa negara kesatuan itu ada karena ia disanggah oleh unsur-unsur yang berbeda. Ada pun unsur-unsur yang berbeda tersebut adalah serat-serat budaya yang sudah berakar dalam pada masing-masing penyangga republik ini.” (Kayam, 1996:72).

Kesatuan menjadi kata keramat yang mampu mengikat semua perbedaan yang amat berpotensi negatif. Umar Kayam mencatat, kesatuan menjadi penting mengingat pengalaman pahit bangsa Indonesia atas politik “bagi dan kuasai” (*divide et impera*) milik kaum penjajah. Anshari (1986:20) bahkan mengatakan bahwa karena kata “kesatuan” ini begitu keramat, tak heran jika para nasionalis Islam dengan rela mengubah Piagam Jakarta ketika golongan nasionalis Kristen menggugatinya. Tidak ada bentuk alternatif lain, selain Negara Kesatuan Republik Indonesia! Tesis ini terus diperkuat ketika Indonesia merasa diri terpecah-pecah ke dalam bentuk negara federasi pada tahun 1950, dan rindu untuk menjadi satu republik kembali. Sunoto menegaskan hal yang sama ketika berbicara mengenai kesatuan dan persatuan:

“Di dalam sejarahnya (Indonesia) telah mempunyai berbagai bentuknya..., misalnya persatuan lokal...Sriwijaya dan Majapahit. Puncak dari persatuan itu tercermin dalam sumpah pemuda.... Itulah sebabnya salah satu jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah persatuan nasional.” (Sunoto: 77-78)

Soekarno meyakini bahwa ke-Ika-an merupakan tali persaudaraan yang menjadi pengikat umat manusia untuk hidup rukun, damai, dan sejahtera. Soekarno berpendapat bahwa cita-cita persatuan ini hanya mungkin dibangun dalam bingkai kegotong-royongan. Konsep multikulturalisme semacam ini seakan-akan menggabungkan antara paham keberagaman dan paham kebaruan. Latief (2011:44-45) menggarisbawahi konsep multikulturalisme seperti ini dalam kutipan berikut:

“Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Dalam khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia mempunyai perspektif “etnosimbolis” yang memadukan antara perspektif modernis (yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan) dengan perspektif primordialis dan perenialis (yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan).”

Penghayatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi penting untuk memahami multikulturalisme Indonesia di tengah himpitan aneka paham radikal yang melemahkan semangat kebersamaan sebagai bangsa. Fathorrahman Ghufron dalam Jawa Pos (1 Oktober 2015) pada momentum Kesaktian Pancasila bahkan mengatakan perlunya “jihad multikulturalisme” dalam kutipan berikut:

“Segecap komponen masyarakat dan pemerintah perlu menggulirkan nilai-nilai dan semangat keindonesiaan dengan menjadikan Pancasila sebagai asas pengetahuan, paham, dan pola pergerakan secara radikal. Hal itu dilakukan agar menjadi wacana tanding atas aksi terorisme yang selalu berkembang dengan beragam metamorfosisnya. Setidaknya metode itu menjadi bentuk ‘jihad multikulturalisme’ untuk memfilter setiap arus..... Pada level aksiologi, semua komponen masyarakat menyadari bahwa Pancasila menjadi serapan bagi banyak pengetahuan, baik yang berbasis agama, budaya, politik, dan yang semacamnya, yang antara satu dan lainnya saling berkait dalam ikatan equal validity serta tidak menafikan kebenaran antara satu dan lainnya. Sebab, substansi ajaran yang terdapat dalam tiap-tiap pengetahuan tersebut sudah terkristal dalam norma besar (grand norm) yang bernama Pancasila.”

Multikulturalisme Indonesia dengan demikian amat menghargai pluralitas. Latief (2011:369) mengatakan bahwa multikulturalisme Indonesia ibarat satu tubuh dengan banyak kaki. Setiap kaki tidak akan ditebas, melainkan dipertahankan untuk memperkokoh rumah kebangsaan Indonesia. Latief menggunakan istilah kaki untuk menjelaskan istilah suku. Latief mengutip pendapat Soekarno yang mengatakan bahwa suku dalam bahasa Jawa berarti “sakil.” Indonesia juga mempunyai banyak kaki, yakni kaki Jawa, kaki Dayak, kaki Sunda, kaki Papua, dan seterusnya yang membangun satu tubuh Indonesia.

Soekarno menggunakan pendapat Ernest Renan yang mengatakan bahwa suatu bangsa adalah satu jiwa, dan jiwa itu adalah kehendak untuk bersatu setelah mengalami penjajahan berabad-abad lamanya. Negara Indonesia dengan demikian merupakan usaha bersama untuk bersatu, dengan kata lain: negara gotong-royong. Usaha untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersatu hanya bisa tercapai jika semua warga bangsa bergotong-royong. Bangsa ini tetap mengakomodasi adanya perbedaan, tetapi harus bersepakat membangun rasa keadilan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik secara

partisipatif tanpa diskriminasi.

Gagasan negara multikultur khas Indonesia dibahasakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep inilah yang memungkinkan semua unsur yang berbhinneka di tanah air Indonesia diakui keberadaannya. Konsep Bhinneka Tunggal Ika pulalah yang membuat pluralisme mekar dengan subur. Lebih lanjut, konsep Bhinneka Tunggal Ika membuat semua elemen yang ada bisa merasa sederajat dan menyumbang sesuatu bagi Indonesia. Jadi, tidak salah jika model ini menjadi dasar bagi bangunan Indonesia yang multikultural. Terminus Bhineka Tunggal Ika itu sendiri pun merupakan sebuah cetusan pengedepanan semangat multikultural yang menghargai setiap perbedaan demi kemajuan bersama.

Soekarno memimpikan terwujudnya "Indonesia bagi semua," maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun Indonesia yang sama. Pidato Soekarno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 menampakkan hal tersebut:

"Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua."(Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:71)

Gagasan kebersamaan, kebangsaan, keadilan, dan kesejahteraan menjadi idaman rakyat dan tujuan negara ini. Di dalam Pancasila, yang dijiwai oleh semangat gotong-royong, segala perbedaan sosial dilebur. Di sinilah letak keunggulan Pancasila sebagai landasan ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bermasyarakat. Namun beberapa orang, apakah itu dari pihak komunis maupun dari pihak agamis, dewasa ini merasa tidak puas dan mencoba menggantikannya. Sepanjang sejarah Indonesia berdiri, banyak usaha yang dilandasi ketidakpuasan ideologi dan ingin memajukan kelompoknya sendiri di atas kepentingan bangsa dan negara.

Dasar untuk demokrasi ala Soekarno adalah "semua buat semua." Demokrasi seperti ini mengimplisitkan prinsip musyawarah dan bukannya suara terbanyak. Bagi Soekarno, suara terbanyak justru akan melahirkan kesewenang-wenangan dan penindasan atas minoritas. Soekarno tidak lagi menyetujui penggunaan terminologi minoritas-mayoritas dalam membangun tata demokrasi Indonesia. Mengapa? Karena terminologi itu lahir dari kultur liberal. Lebih dari itu, sebenarnya satu suara, bahkan yang berasal dari kelompok minoritas sekalipun, mempunyai arti yang sama bagi kehidupan bernegara. Sistem gotong-royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia jelas tidak meninggalkan kaum minoritas, bahkan sebaliknya, merangkul semua ke dalam suasana kebersamaan.

Menurut Soekarno, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yakni nasionalisme dan internasionalisme (perikemanusiaan). Ada nasionalisme yang tumbuh di luar prinsip kemanusiaan. Nasionalisme yang demikian adalah nasionalisme chauvinistis yang terjadi di Jerman yang meyakini bahwa "Deutschland uber Alles" (Jermania di atas segalanya). Nasionalisme Indonesia harus tumbuh

di atas kekeluargaan yang mampu mempersatukan aneka suku, agama, budaya, bahkan batas negara sekalipun.

Paham Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya bukan hanya dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia saja, melainkan juga sangat ampuh dipakai oleh anggota masyarakat internasional yang juga diwarnai oleh keragaman etnis dan budaya. Pancasila menurut Soekarno diambil berdasarkan budaya bangsa secara “turun-temurun,” dan “sebagai perasaan-perasaan rakyat yang selama ini terpendam diam-diam dalam hati rakyat” (Hadinoto, 2000, :24-30) Mpu Prapanca dalam Negara Kertagama-nya sudah memunculkan istilah Pancasila. Kemudian Mpu Tantular dalam Sutasomanya memunculkan istilah Bhinneka Tunggal Ika.” Tampak bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah gambaran pribadi rakyat sedari dulu kala (Panggalo, 1998:204).

Lalu apa yang harus dilakukan? Di titik ini semua pihak harus menghayati pemahaman para pendiri negara ini dalam hal pengedepanan semangat multikultural, seperti yang diyakini Hatta (Sidjabat, 1982:49). Prinsip keislaman Hatta selalu dijiwai dengan keindonesiaan yang solid tanpa harus disertai dengan pemaknaan ‘arabisasi’ secara formal dan berlebihan (seperti yang terjadi pada generasi sekarang). Hal ini sudah nampak gejalanya, mulai dari munculnya Perda dan aneka peraturan/perundangan yang bernuansa syariah. Yang terjadi kemudian seakan-akan ada ‘negara di dalam negara,’ yang bagi para intelektual merupakan ‘satu langkah lagi menuju merdeka.’

Para pembuat Undang-undang seharusnya menyadari bahwa kekhususan yang dibuat semestinya masih menghargai Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Ada bahaya bahwa dalam situasi ‘yang khusus’ tersebut, Garuda Pancasila sudah tidak dianggap lagi, walaupun secara formal masih tergantung di dinding atau dipajang di mimbar pemerintah daerah. Hal ini merupakan suatu ironi di dalam suatu negara berdaulat, di mana dikesankan bahwa dasar negara bisa diganti secara ‘main belakang’ (meskipun tidak konstitusional, tetapi dilegalkan).

Paham multikulturalisme dan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menjadi kemenangan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi ternyata hal ini dianggap sebagai kemenangan kaum nasionalis yang dicurigai sebagai sekularis semata-mata. Sakit hati yang tidak rasional itu semakin nyata, ketika individu-individu ingin memaksakan tindakan-tindakan atas nama agama terus menebar pengaruh dan bahkan teror kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Benang merah yang amat tampak dari pembahasan tema di atas adalah bahwa semangat multikultural ternyata dewasa ini menemui tantangan dalam hidup berbangsa. Kecenderungan yang merebak justru adalah semakin menipisnya kebersamaan, menguatnya etnosentrisme, separatisme, dan tebaran percik antiloteran di sana-sini. Kesan yang muncul dewasa ini adalah: adagium ”Bhinneka Tunggal Ika” hanya tinggal slogan dan semboyan, padahal sebenarnya kebhinekaan adalah realita

masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bangsa ini ada dalam suatu proyek besar dan panjang untuk mengembalikan lagi semangat ketunggalan dalam keberagaman di tengah kehidupan bangsa yang multikultural ini.

Ide Bhinneka Tunggal Ika di sini bukanlah prinsip ideologis semata, melainkan lebih berupa penghayatan bersama dalam kebersamaan dan kemajemukan. Kebangsaan bukan cuma sekedar persamaan tumpah darah dan tempat tinggal. Jauh melampaui itu, kebangsaan adalah soal bagaimana tiap warganya diikat oleh perasaan dan kehendak yang sama untuk maju di tengah keberagaman. Kebangsaan yang diusung Soekarno menengahkan prinsip kesatuan dalam kebhinekaan di tengah multikulturalnya bangsa ini. Realitas ini sebenarnya tampak ketika bencana tsunami melanda Aceh. Saat itu semua warga bangsa (bahkan dunia) tergerak untuk turun tangan dengan berbagai cara. Semua warga, tanpa dikomando, seakan diikat oleh rasa yang sama bahwa yang sedang menderita adalah sesama warga bangsa juga. Semua merasa senasib sepenanggungan membantu dengan caranya masing-masing tanpa memperdulikan unsur SARA. Inilah potret Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya dalam negara yang multikultural ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Endang Saifudin, 1986, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Rajawali Press, Jakarta
- Diamond, Larry dan Marc F. Plattner (eds). 1998. Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi. ITB, Bandung
- Ghufron, Fathorrahman., 2015, "Radikalisasi Kesaktian Pancasila" dalam JAWA POS 1 Oktober 2015
- Hadinoto, 1998, Dialog dan Edukasi, Universitas Gajah Mada.
- Kayam, Umar., 1996, "Transformasi Budaya Kita," dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Latief, Yudi., 2012, Negara Paripurna, Gramedia, Jakarta
- Panggalo, 1998, "Diskusi Menyangkut Dasar Negara RI dan Posisi orang Kristen di Indonesia" dalam Peran Serta Gereja dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Sinar harapan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Jakarta.
- Sidjabat, W.B., 1982, Religious Tolerance and Christian Faith, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Sudhiarsa, Raymundus, 2008, Kearifan Sosial Lintas Budaya – SVD Surya Wacana Merespon Misi Gereja, Lamalera
- Sunoto, 2000, Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika, Yogyakarta, Hanindita
- Suparlan, Parsudi., 2002, Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural, dalam Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Juli